

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH**

**Jl. Achmad Yani Telp. (0561) 736541 Fax. (0561) 730062
PONTIANAK - 78124**



**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN II
TAHUN 2019-2023
BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Revisi) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dapat terselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi.

Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan, Program dan Kegiatan yang merupakan acuan dan panduan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat, dan diharapkan Renstra ini dapat menjadi komitmen dan kesatuan langkah dalam menentukan arah dan peran Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dalam mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya, sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan visi dan misi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat

Kepada Tim Penyusun yang telah bekerja maksimal menyelesaikan Dokumen Rencana Strategis (Revisi) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 ini, kami atas nama Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Amin.

Pontianak, April 2022
Kepala Biro Perekonomian,



FRANS ZENO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19790302 199802 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI-----	ii
DAFTAR TABEL-----	iii
BAB I. PENDAHULUAN-----	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH-----	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
2.3 Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Perekonomian	32
BAB III.PERMASALAHANA DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	33
3.2 Telaahan Visi, Misi Serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	34
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Renstra.....	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	35
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	35
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN-----	36
BAB V. STRATEGIS DAN KEBIJAKAN-----	37
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN-----	38
BAB VII. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PEREKONOMIAN-----	83
BAB VIII. PENUTUP-----	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Pergub No.77 tahun 2019).....	11
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Menurut Pangkat Golongan Tahun 2020 (Pergub No.77 tahun 2019).....	12
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Pergub No.77 tahun 2019).....	12
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural (Pergub No.77 tahun 2019).....	13
Tabel 2.5 Kondisi Sarana dan Prasaran Biro Perekonomian.....	13
Tabel 2.6 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Pergub No.110 tahun 2021).....	15
Tabel 2.7 Jumlah Pegawai Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Menurut Pangkat Golongan Tahun 2020 (Pergub No.110 tahun 2021).....	15
Tabel 2.8 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Pergub No.110 tahun 2021).....	16
Tabel 2.9 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural (Pergub No.110 tahun 2021).....	16
Tabel 2.10 Kondisi Sarana dan Prasaran Biro Perekonomian.....	17
Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat.....	20
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	33
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan.....	37
Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat.....	39
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat	83

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen Perencanaan Perangkat untuk periode 5 (lima) tahun dan Perencanaan Teknis Operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD serta merupakan pengukuran kinerja Perangkat Daerah untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat juga dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Kabupaten/Kota, Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan DPRD menjadi acuan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat merumuskan dalam Rancangan Renstra yang akan dituangkan ke dalam Rencana Tahunan terdiri dari (a) Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- o. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
- p. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- v. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- w. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaga Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
- x. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- y. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaga Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
- z. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 8; Tambahan Lembaran Daerah No 6);
- aa. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023;
- bb. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- cc. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagai acuan resmi dan pedoman bagi Biro Perekonomian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama periode 2018-2023 yang dituangkan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun dan Rencana Kerja Anggaran.

Tujuan disusunnya Renstra Biro Perekonomian setda Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- a. Menjabarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang lebih terukur ke dalam Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Tahun 2018-2023 dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023;
- b. Merumuskan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Memberikan dasar dalam Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat baik dalam tahunan maupun lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
- 3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategi

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Pergub No. 77 Tahun 2019

Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dibentuk dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat merupakan **Unsur Staf** Perangkat Daerah **Sekretariat Daerah** Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan **Peraturan Gubernur Kalimantan Barat 77 Tahun 2019** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, bahwa Biro Perekonomian menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan fungsinya penyelenggaraan kegiatan urusan Pemerintah, pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi di bidang Daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD.

Selanjutnya, Susunan Organisasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Kepala Biro;
2. Bagian Kebijakan Perekonomian;
 - a. Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro;
 - b. Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
3. Bagian Sumber Daya Alam
 - a. Sub Bagian Sumber Daya Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
 - b. Sub Bagian Sumber Daya Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
 - c. Sub Bagian Sumber Daya Energi dan Air.
4. Bagian BUMD dan BLUD
 - a. Sub Bagian BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
 - b. Sub Bagian BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
 - c. Sub Bagian BLUD.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan Tugas dan Fungsi tiap Struktur Bagian sebagai berikut :

1. *Bagian Kebijakan Perekonomian*

Bagian Kebijakan Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro, dan tata usaha biro, serta

bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi. Fungsi Bagian Kebijakan Perekonomian, yaitu :

- a. **Penyusunan program kerja** Bagian Kebijakan Perekonomian;
- b. **Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah** di bidang analisis ekonomi makro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. **Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah** di bidang analisis ekonomi mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. **Pelaksanaan kegiatan urusan dan pelayanan** ketatausahaan Biro;
- e. **Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi** di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. **Pengkoordinasian dan fasilitas dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi** di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. **Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi** di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. **Pembinaan dan pengawasan** di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. **Pemberian saran dan pertimbangan** kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. **Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi** di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. **Pelaksanaan fungsi lain** di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha biro yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Bagian Sumber Daya Alam;

Bagian sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan lingkungan hidup, energi dan air, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi. Fungsi Bagian Bagian sumber Daya Alam, yaitu :

- a. **Penyusunan program kerja** Bagian Sumber Daya Alam;
- b. **Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah** di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. **Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah** di bidang sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. **Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah** di bidang sumber daya energi dan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. **Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi** di bidang sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. **Pengkoordinasian dan fasilitas perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi** di bidang sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. **Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi** di bidang sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. **Pembinaan dan pengawasan** di bidang sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. **Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi** di bidang sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. **Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi** di bidang sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. **Pelaksanaan fungsi lain** di bidang sumber daya alam yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. *Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah*

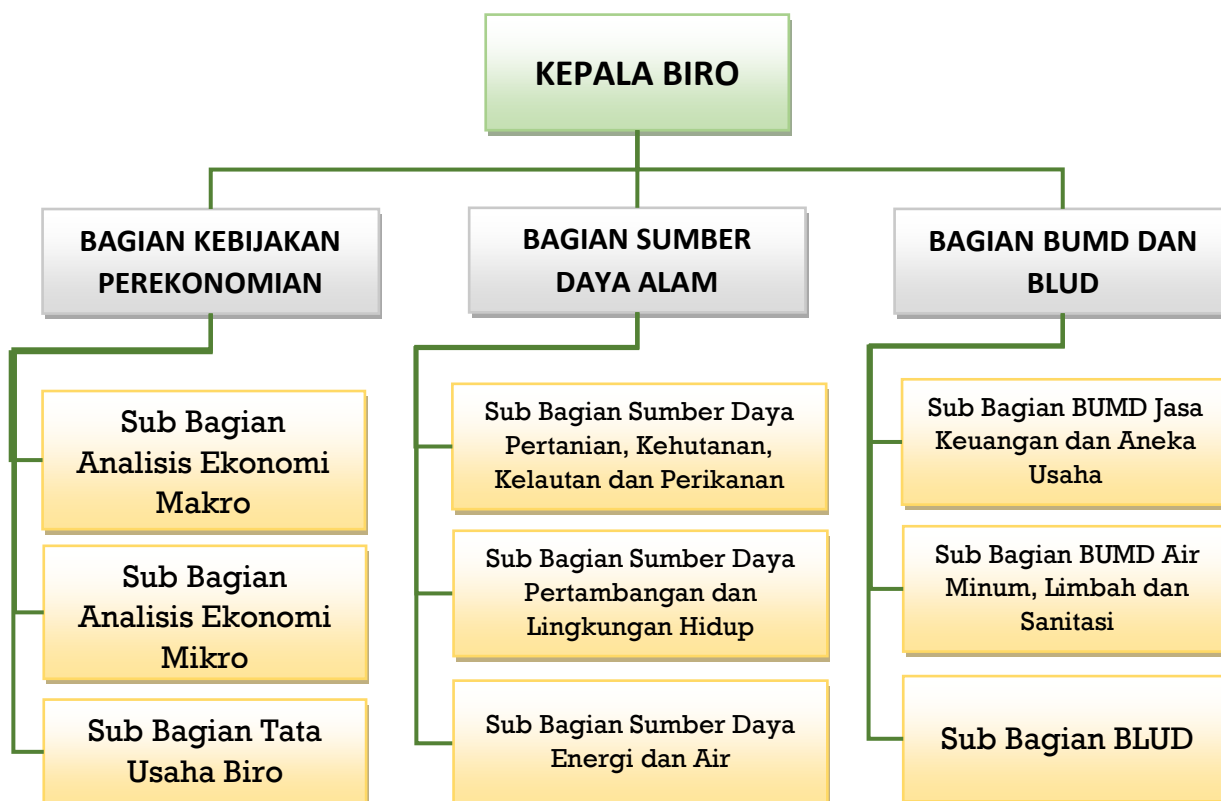
Bagian Sarana Perekonomian Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah di bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi. Fungsi Bagian Sarana Perekonomian Daerah, yaitu :

- a. **Penyusunan program kerja** Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. **Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah** di bidang badan usaha milik daerah, jasa keuangan dan aneka usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. **Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah** di bidang badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. **Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah** di bidang badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. **Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi** di bidang badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. **Pengkoordinasian dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi** di bidang badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. **Pelaksanaan kegiatan urusan Pemerintahan Provinsi** di bidang badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. **Pembinaan dan pengawasan** di bidang badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. **Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi** di bidang badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- j. **Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi** di bidang badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. **Pelaksanaan fungsi lain** di bidang badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Sehubungan dengan itu, Susunan Struktur Organisasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Bagan di bawah ini :

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat



2.1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Pergub No. 110 Tahun 2021

Berdasarkan **Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021** dan **Peraturan Gubernur Kalimantan Barat 110 Tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, bahwa terdapat perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi Biro Perekonomian yaitu mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, dengan fungsinya :

- a. Perumusan program kerja di bidang perekonomian;
- b. Perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain di bidang perekonomian yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Biro Perekonomian sebagaimana dimaksud Pergub No. 110 Tahun 2021 dalam pasal 47 terdiri dari :

- a. Kepala Biro
- b. Sub Bagian Tata Usaha Biro; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala biro sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, memfasilitasi, menyelenggarakan, menagwasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan serta mengkoordinasikan kebijakan perangkat daerah di bidang perekonomian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, Kepala Biro mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kerja di bidang perekonomian;
- b. Penyusunan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang analisis ekonomi makro dan analisis ekonomi mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta ketahanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang sumber daya pertambangan dan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang sumber daya energi dan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Pelaksanaan kegiatan urusan dan pelayanan ketatausahaan biro;
- l. Pengkoordinasian dan fasilitasi kebijakan perangkat daerah di bidang perekonomian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pengendalian kegiatan di bidang perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD serta reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja di lingkungan biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Pelaksanaan fungsi lain di bidang perekonomian yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

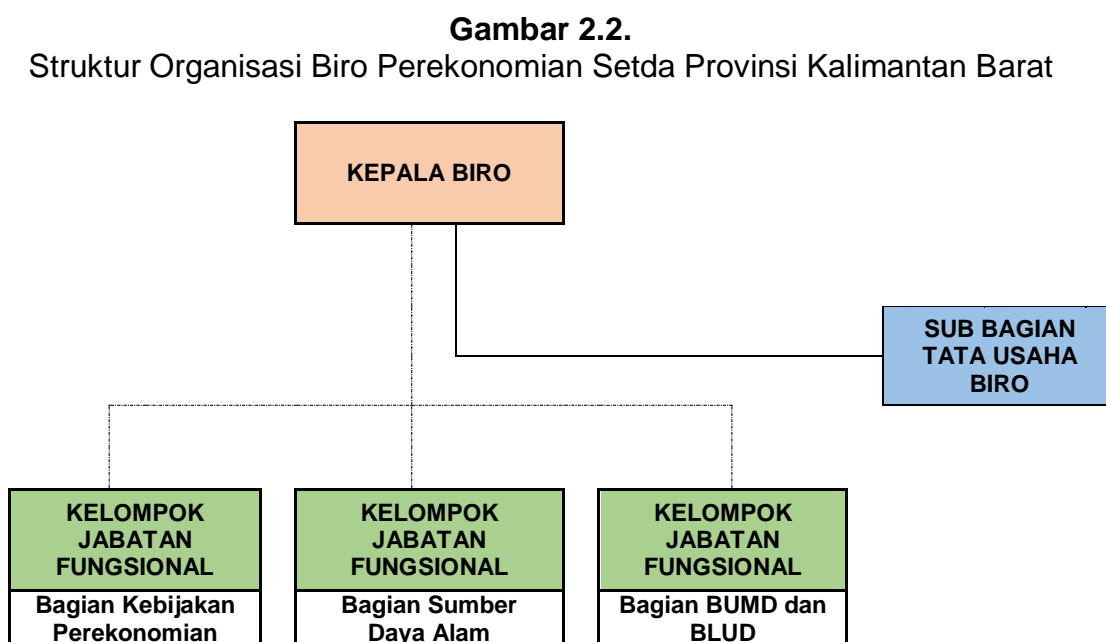
Untuk Sub Bagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro.

Sub Bagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 mempunyai tugas melaksanakan urusan dan pelayanan ketatausahaan Biro. Untuk melaksanakan tugas tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- b. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kegiatan Biro;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional maupun pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- d. Pelayanan administrasi kepegawaian, pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sisten akuntansi dan pelaporan, pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- e. Pelaksanaan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatausahaan, penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- f. Pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ dan LPPD lingkup bio, perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
- g. Penyusunan rencana kerja reformasi birokrasi, perjankin, proses bisnis, SOP, cascading, analisis jabatan, analisis beban kerja (ABK), standar kompetensi jabatan (SKJ) administrasi, uraian jabatan, peta jabatan, evaluasi jabatan, pengelolaan standart pelayanan publik, serta peningkatan nilai dan etika budaya kerja;
- h. Pelaksanaan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan Pegawai ASN di lingkungan biro;

- i. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di tata usaha biro;
- j. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian tata usaha biro;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha Biro; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain di bidang ketatausahaan yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, Susunan Struktur Organisasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Bagan di bawah ini :



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah Berdasarkan Pergub No. 77 Tahun 2019

2.2.1.1. Kondisi Kepegawaian

Sumber daya aparatur merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang dimiliki mempengaruhi kapasitas pelayanan organisasi.

Berdasarkan kondisi riil pada 2020, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat memiliki **personil** sebanyak **43 orang** yang **berstatus** sebagai **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** dan **2 orang tenaga honorer** yang bekerja untuk mendukung tugas-tugas perkantoran. Kondisi sumber daya aparatur dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1.
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(per 31 Desember 2020)

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Laki-laki	25

2.	Perempuan	20
	Jumlah	45

Sumber : Subbagian Tata Usaha Biro, 31 Desember 2020.

Berdasarkan data tersebut di atas menggambarkan bahwa pegawai berjenis kelamin laki-laki di Biro Perekonomian setda Provinsi Kalimantan Barat lebih banyak dibanding pegawai berjenis perempuan sebanyak 20 orang atau sebesar 44,44 % dari 43 orang di tambah dengan tenaga kontak 2 Orang, jumlah total pegawai di Biro perekonomian sebanyak 45 orang.

Tabel 2.2.

Jumlah Pegawai Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat.
Menurut Pangkat Golongan Tahun 2020

No.	Unit	Pangkat/Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kepala Biro	1	-	-	-	1
2.	Bagian Kebijakan Perekonomian	1	13	4	1	20
3.	Bagian Sumber Daya Alam	3	9	-	-	11
4.	Bagian BUMD dan BLUD	1	9	1	-	11
	Total	6	31	5	1	43

Sumber : Subbagian Tata Usaha Biro, 31 Desember 2020.

Jumlah Pegawai di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 43 Orang dengan dominasi pada golongan III sebanyak 31 orang atau 72,09% dari keseluruhan Pegawai di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, disusul Pegawai Golongan IV sebanyak 6 orang atau sebesar 13,95%, kemudian Pegawai Golongan II sebanyak 5 Orang atau sebesar 11,62% dan Golongan I sebanyak 1 Orang atau sebesar 2,33%.

Peningkatan kinerja organisasi juga ditentukan oleh pendidikan yang dimiliki aparatur. Peran pendidikan aparatur adalah sebagai pencipta nilai untuk keunggulan kompetitif melalui penurunan biaya, orientasi pada masyarakat sebagai pelanggan, peningkatan produktivitas dan komitmen kerja.

Berdasarkan data pada tabel 2.3 di bawah ini, terlihat rata-rata tingkat pendidikan pegawai di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2020 merupakan tingkat pendidikan dengan **kategori cukup tinggi**.

Tabel. 2.3

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Jumlah
1.	S3	- Orang
2.	S2	8 Orang
3.	S1	20 Orang
4.	D4	2 Orang
5.	Sarmud/D3	2 Orang

6.	SLTA	10 Orang
7.	SLTP	- Orang
8.	SD	1 Orang
Jumlah		43 Orang

Sumber : Subbagian Tata Usaha Biro, 31 Desember 2020.

Berdasarkan Jabatan Struktural, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat memiliki Pejabat Jabatan Pimpinan Pratama 1 orang, 3 orang Jabatan Adminsitrator, 9 orang jabatan Pengawas, dan 1 orang Jabatan Fungsional, hal ini dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 2.4.
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jabatan Pimpinan Pratama	1 Orang
2.	Jabatan Administrator	3 Orang
3.	Jabatan Pengawas	9 Orang
4.	Jabatan Fungsional	1 Orang
Total		14 Orang

Sumber : Subbagian Tata Usaha Biro, 31 Desember 2020.

Berkenaan dengan itu, apabila melihat Kondisi Sumber Daya Aparatur dan Sumber Daya Aset di lingkungan Biro Perekonomian Daerah Setda Provinsi Kalimantan Barat maka **cukup signifikan** dengan kelancaran tugas dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat. Tidak dipungkiri bahwa terdapat keterbatasan kualitas dan kuantitas di Sumber Daya Aparatur.

2.2.1.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Biro Perekonomian setda Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel.2.5.
Kondisi Sarana dan Prasana Biro Perekonomian

No	Jenis Barang	Merk/ Model	Bahan	Jumlah	Kondisi
1.	Mobil Dinas	Grand Vitara	Besi	1	Cukup baik
2.	Mobil Dinas	Grand Livina	Besi	1	Cukup baik
2.	Motor Dinas	Yamaha	Besi	2	Cukup baik
3.	Meja Kerja Kepala Biro	-	Kayu	1	Kurang baik
4.	Meja Kerja Kepala Bagian	-	Kayu	3	Cukup baik
5.	Kursi Kerja	Fantony	Kayu/Busa	1	Cukup

No	Jenis Barang	Merk/ Model	Bahan	Jumlah	Kondisi
	Kepala Biro				baik
6.	Kursi Kerja Kepala Bagian	-	Kayu/Busa	3	Cukup baik
7.	Meja Kerja Kasubbag	-	Kayu	9	Kurang baik
8.	Kursi Kerja Kasubbag	-	Kayu/Busa	9	Kurang baik
9.	Meja Kerja Staf	-	Kayu	14	Kurang baik
10.	Kursi Kerja Staf	-	Kayu/Busa	20	Kurang baik
11.	Filling Cabinet	-	Besi	6	Cukup baik
12.	Lemari Besi	-	Besi	11	Cukup baik
13.	Lemari Kaca	-	Kacar/Kayu	3	Cukup baik
14.	Meja Komputer	-	Kayu	10	Kurang baik
15.	Pesawat Telp		Besi	11	Cukup baik
16.	AC		Besi/Busa	11	Kurang baik
17.	UPS			7	Cukup baik
18.	Komputer			12	Cukup baik
19.	Brankas	-	Besi	2	Cukup baik
20.	Mesin Ketik	-	Besi	3	Cukup baik
21.	Rak Besi	-	Besi	6	Cukup baik
22.	Jam dinding	-	Plastik	3	Cukup baik
23.	Kipas Angin	-	Plastik	2	Cukup baik
24.	Kursi Tamu	-	Besi/Bahann sofs	3 Set	Cukup baik
25.	Kursi Hadap	Aditech	Kayu	10	Kurang baik
26.	Vacuum Cleaner	-	Besi	1	Cukup Baik

Sumber : Subbagian Tata Usaha Biro, 31 Desember 2020

Berdasarkan tabel 2.5, mengindikasikan bahwa sarana dan prasarana Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat **perlu peningkatan** untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas aparatur di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat,

disamping itu masih perlu didukung dengan adanya **wifi yang lancar** dalam rangka mendukung kegiatan terkait **inovasi berbasis teknologi informasi**.

2.2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Sesuai Pergub No. 110 Tahun 2021

2.2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Sumber daya aparatur merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang dimiliki mempengaruhi kapasitas pelayanan organisasi.

Berdasarkan kondisi riil pada 2022, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat memiliki **personil** sebanyak **42 orang** yang **berstatus** sebagai **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** dan **2 orang tenaga honorer** yang bekerja untuk mendukung tugas-tugas perkantoran. Kondisi sumber daya aparatur dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.6.
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(per 31 Maret 2022)

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Laki-laki	25
2.	Perempuan	17
Jumlah		42

Sumber : Subbagian Tata Usaha Biro, 31 Maret 2022.

Berdasarkan data tersebut di atas menggambarkan bahwa pegawai berjenis kelamin laki-laki di Biro Perekonomian setda Provinsi Kalimantan Barat lebih banyak dibanding pegawai berjenis perempuan sebanyak 17 orang atau sebesar 59,52 % dari 42 orang di tambah dengan tenaga kontak 2 orang, jumlah total pegawai di Biro perekonomian sebanyak 44 orang.

Tabel 2.7.
Jumlah Pegawai Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat.
Menurut Pangkat Golongan Tahun 2022

No.	Unit	Pangkat/Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kepala Biro	1	-	-	-	1
2.	Bagian Kebijakan Perekonomian	1	12	4	1	18
3.	Bagian Sumber Daya Alam	2	10	-	-	11
4.	Bagian BUMD dan BLUD	-	10	1	-	12
Total		4	32	5	1	42

Sumber : Subbagian Tata Usaha Biro, 31 Maret 2022.

Jumlah Pegawai di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 42 Orang dengan dominasi pada golongan III sebanyak 32 orang atau 76,19% dari keseluruhan Pegawai di Biro

Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, disusul Pegawai Golongan IV sebanyak 4 orang atau sebesar 9,52%, kemudian Pegawai Golongan II sebanyak 5 Orang atau sebesar 11,90% dan Golongan I sebanyak 1 Orang atau sebesar 2,38%.

Peningkatan kinerja organisasi juga ditentukan oleh pendidikan yang dimiliki aparatur. Peran pendidikan aparatur adalah sebagai pencipta nilai untuk keunggulan kompetitif melalui penurunan biaya, orientasi pada masyarakat sebagai pelanggan, peningkatan produktivitas dan komitmen kerja.

Berdasarkan data pada tabel 2.3 di bawah ini, terlihat rata-rata tingkat pendidikan pegawai di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat per 31 Maret 2022 merupakan tingkat pendidikan dengan **kategori cukup tinggi**.

Tabel. 2.8
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Per 31 Maret 2022

No.	Uraian	Jumlah
1.	S3	- Orang
2.	S2	7 Orang
3.	S1	21 Orang
4.	D4	2 Orang
5.	Sarmud/D3	2 Orang
6.	SLTA	9 Orang
7.	SLTP	- Orang
8.	SD	1 Orang
Jumlah		42 Orang

Sumber : Subbagian Tata Usaha Biro, 31 Maret 2022.

Berdasarkan Jabatan Struktural, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat memiliki Pejabat Jabatan Pimpinan Pratama 1 orang, 3 orang Jabatan Adminsitrator, 9 orang jabatan Pengawas, dan 1 orang Jabatan Fungsional, hal ini dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 2.9
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jabatan Pimpinan Pratama	1 Orang
2.	Jabatan Administrator	- Orang
3.	Jabatan Pengawas	1 Orang
4.	Jabatan Fungsional	13 Orang
Total		15 Orang

Sumber : Subbagian Tata Usaha Biro, 31 Maret 2022.

Berkenaan dengan itu, apabila melihat Kondisi Sumber Daya Aparatur dan Sumber Daya Aset di lingkungan Biro Perekonomian Daerah Setda Provinsi Kalimantan Barat maka **cukup signifikan** dengan kelancaran tugas dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat. Tidak dipungkiri bahwa terdapat keterbatasan kualitas dan kuantitas di Sumber Daya Aparatur.

2.2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Biro Perekonomian setda Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel.2.10
Kondisi Sarana dan Prasana Biro Perekonomian

No	Jenis Barang	Merk/ Model	Bahan	Jumlah	Kondisi
1.	Mobil Dinas	<i>Grand Vitara</i>	Besi	1	Cukup baik
2.	Motor Dinas	Yamaha	Besi	1	Cukup baik
3.	Meja Kerja Kepala Biro	-	Kayu	1	Kurang baik
4.	Meja Kerja Kepala Bagian	-	Kayu	3	Cukup baik
5.	Kursi Kerja Kepala Biro	Fantony	Kayu/Busa	1	Cukup baik
6.	Kursi Kerja Kepala Bagian	-	Kayu/Busa	3	Cukup baik
7.	Meja Kerja Kasubbag	-	Kayu	9	Kurang baik
8.	Kursi Kerja Kasubbag	-	Kayu/Busa	9	Kurang baik
9.	Meja Kerja Staf	-	Kayu	14	Kurang baik
10.	Kursi Kerja Staf	-	Kayu/Busa	20	Kurang baik
11.	Filling Cabinet	-	Besi	6	Cukup baik
12.	Lemari Besi	-	Besi	11	Cukup baik
13.	Lemari Kaca	-	Kacar/Kayu	3	Cukup baik
14.	Meja Komputer	-	Kayu	10	Kurang baik
15.	Pesawat Telp		Besi	11	Cukup baik
16.	AC		Besi/Busa	11	Kurang baik
17.	UPS			7	Cukup baik
18.	Komputer			12	Cukup baik
19.	Brankas	-	Besi	2	Cukup baik
20.	Mesin Ketik	-	Besi	3	Cukup

No	Jenis Barang	Merk/Model	Bahan	Jumlah	Kondisi
					baik
21.	Rak Besi	-	Besi	6	Cukup baik
22.	Jam dinding	-	Plastik	3	Cukup baik
23.	Kipas Angin	-	Plastik	2	Cukup baik
24	Kursi Tamu	-	Besi/Bahann sofs	3 Set	Cukup baik
25.	Kursi Hadap	Aditech	Kayu	10	Kurang baik
26.	Vacuum Cleaner	-	Besi	1	Cukup Baik

Sumber : Subbagian Tata Usaha Biro, 31 Maret 2022

Berdasarkan tabel 2.10, mengindikasikan bahwa sarana dan prasarana Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat **perlu peningkatan** untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas aparatur di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat, disamping itu masih perlu didukung dengan adanya **wifi yang lancar** dalam rangka mendukung kegiatan terkait **inovasi berbasis teknologi informasi**.

2.3. Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian

Pencapaian Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat selama periode lima tahun (2014-2018) dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.11.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Perekonomian
Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator Kinerja Biro Perekonomian	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian Daerah di Bidang Sumber Daya Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan kelautan, ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral.	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	93,52	95,82	96,60	100	n/a	93,52	95,82	96,60	100
2	Terwujudnya Implementasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Sarana Perekonomian Yang Efisien dan Optimal.	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	100	100	100	100	n/a	100	100	100	100

Tabel 2.12.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Biro Perekonomian
Provinsi Kalimantan Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Realisasi antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Perumusan Kebijakan Umum Perekonomian dan Pembangunan Daerah	-	2.344.725.000	1.971.653.000	1.929.824.000	-	-	2.171.879.256	1.876.314.940	1.832.891.517	-	-	91,40	95,90	90,64	-	1.249.240.400	1.176.217.143
Fasilitasi Kebijakan Pemberdayaan dan Kemandirian Pangan serta Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin	-	122.393.000	87.347.000	158.033.000	-	-	117.814.500	85.585.000	156.869.650	-	-	96,26	97,98	99,26	-	73.554.600	72.053.830
Fasilitasi Kebijakan Pengembangan di Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	-	133.017.000	85.281.000	94.948.500	-	-	120.305.400	85.200.000	92.219.100	-	-	90,44	99,91	97,13	-	62.649.300	59.544.900
Fasilitasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian	-	122.915.000	120.484.000	-	-	-	109.880.400	110.741.700	-	-	-	89,40	91,91	-	-	60.849.750	55.155.525
Pembinaan Usaha Perkebunan di Kalimantan Barat	-	272.340.000	242.094.700	277.018.500	-	-	262.089.980	205.875.800	266.576.000	-	-	96,24	85,04	96,23	-	158.290.640	146.908.356
Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	119.880.000	80.327.000	70.000.000	-	-	111.140.400	76.219.200	59.282.300	-	-	92,71	94,89	84,69	-	54.041.400	49.328.380

Rencana Strategis 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Realisasi antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan	-	60.000.000	54.240.000	90.000.000	-	-	50.353.000	50.586.000	84.710.500	-	-	83,92	93,26	94,12	-	40.848.000	37.129.900
Fasilitasi Pelaksanaan Verifikasi dan Monitoring Evaluasi Hutan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Kehutanan	-	95.500.000	78.000.000	75.000.000	-	-	91.349.000	76.639.600	74.589.000	-	-	95,65	98,26	99,45	-	49.700.000	48.515.520
Fasilitasi Penyusunan Bahan Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	194.470.000	149.900.000	150.000.000	-	-	193.166.400	147.860.000	149.450.000	-	-	99,33	98,64	99,63	-	98.874.000	98.095.280
Fasilitasi Kebijakan Pendistribusian dan Penetapan Harga, Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kebijakan Mendukung Perkembangan Usaha di Bidang Pertambangan dan Energi	-	221.285.000	166.000.000	140.000.000	-	-	214.744.600	160.523.100	139.237.500	-	-	97,04	96,70	99,46	-	105.457.000	102.901.040

Rencana Strategis 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Realisasi antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kebijakan Gubernur Mengenai Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik di Provinsi Kalimantan Barat	-	67.925.000	62.400.000	85.000.000	-	-	51.777.500	58.701.000	84.538.200	-	-	76,23	94,07	99,46	-	43.065.000	39.003.340
Monitoring Penyelenggaraan Sektor Pekerjaan Umum	-	100.000.000	60.987.000	43.638.000	-	-	90.628.676	59.355.600	41.693.600	-	-	90,63	97,33	95,54	-	40.925.000	38.335.575
Fasilitasi Penyelenggaraan Sektor Jasa Kontruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring Penyelenggaraan Sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	-	100.000.000	65.798.000	69.177.000	-	-	70.560.900	64.216.700	66.844.603	-	-	70,56	97,60	96,63	-	46.995.000	40.324.441
Pokja Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat	-	123.000.000	104.038.000	110.613.000	-	-	120.674.800	98.384.500	92.574.300	-	-	98,11	94,57	83,69	-	67.530.200	62.326.720
Sosialisasi Kebijakan Sektor Jasa Kontruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	-	90.500.000	109.185.000	67.067.000	-	-	85.913.300	107.769.000	63.755.000	-	-	94,93	98,70	95,06	-	53.350.400	51.487.460
Fasilitasi Kebijakan Bidang Koperasi, UMKM, dan Pariwisata	-	87.000.000	104.779.500	63.076.000	-	-	82.999.000	102.963.740	59.362.389	-	-	95,40	98,27	94,11	-	50.971.100	49.065.026
Koordinasi dan Monitoring Perkembangan Harga Sembako dan Barang-	-	83.000.000	40.500.000	-	-	-	75.395.500	39.590.000	-	-	-	90,84	97,75	-	-	30.875.000	28.746.375

Rencana Strategis 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Realisasi antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Barang Strategis Lain nya																	
Pengendalian Inflasi Daerah	-	57.500.000	72.680.000	91.200.000	-	-	57.309.400	67.114.000	86.900.000	-	-	99,67	92,34	95,29	-	44.276.000	42.264.680
Fasilitasi, Konsultasi dan Koordinasi kebijakan Bidang Penanaman Modal	-	94.000.000	90.310.000	48.637.000	-	-	77.115.000	86.348.200	48.601.931	-	-	82,04	95,61	99,93	-	46.589.400	42.413.026
Fasilitasi dan Konsultasi Kebijakan bidang Lembaga Keuangan	-	100.000.000	75.054.000	54.416.000	-	-	98.562.800	72.987.000	54.288.258	-	-	98,56	97,25	99,77	-	45.894.000	45.167.612
Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Pengembangan BUMD	-	100.000.000	122.247.800	195.000.000	-	-	90.098.700	119.654.800	164.999.186	-	-	90,10	97,88	84,61	-	83.449.560	74.950.537
Fasilitasi Rekrutmen Direksi BUMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Aneka usaha Prov. Kalimantan Barat	-	-	-	47.000.000	-	-	-	-	46.400.000	-	-	-	-	98,72	-	15.666.667	15.466.667
Program Bina Perekonomian Daerah di Bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Energi dan Sumberdaya	-	-	-	-	1.074.490.000	-	-	-	-	883.784.060	-	-	-	-	39,86	214.898.000	176.756.812

Rencana Strategis 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Realisasi antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Mineral																	
Penyusunan Perumusan Kebijakan Makro Pengembangan Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	-	-	-	-	85.990.000	-	-	-	-	51.791.000	-	-	-	-	60,23	17.198.000	10.358.200
Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Usaha Perkebunan	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	161.113.000	-	-	-	-	80,56	40.000.000	32.222.600
Evaluasai Kebijakan Pengembangan Usaha Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kajian Kebijakan Potensi Pertanian di Daerah Perbatasan	-	-	-	-	36.600.000	-	-	-	-	35.351.200	-	-	-	-	96,59	7.320.000	7.070.240
Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Pupuk Bersubsidi di Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Perumusan Kebijakan Kemandirian dan Ketahanan Pangan Masyarakat (HPS Nas, HPS Prov, Gelar Pangan nas, Monev Pelaksanaan Kebijakan)	-	-	-	-	144.000.000	-	-	-	-	98.972.700	-	-	-	-	68,73	28.800.000	19.794.540

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Realisasi antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Penyusunan Kuota)	-	-	-	-	70.000.000	-	-	-	-	64.321.700	-	-	-	-	91,89	14.000.000	12.864.340
Kajian Kebijakan Potensi Peternakan Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Kebijakan Makro Bidang Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat	-	-	-	-	85.000.000	-	-	-	-	78.554.800	-	-	-	-	92,42	17.000.000	15.710.960
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Usaha Dalam Kawasan Hutan Kalimantan Barat	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	63.632.240	-	-	-	-	84,84	15.000.000	12.726.448
Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat	-	-	-	-	140.000.000	-	-	-	-	127.829.620	-	-	-	-	91,31	28.000.000	25.565.924
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	19.150.000	-	-	-	-	19.150.000	-	-	-	-	100,00	3.830.000	3.830.000

Rencana Strategis 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Realisasi antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kalimantan Barat																	
Penyusunan Perumusan Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Barat	-	-	-	-	173.000.000	-	-	-	-	149.980.800	-	-	-	-	86,69	34.600.000	29.996.160
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Mineral Kalimantan Barat	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	19.727.000	-	-	-	-	78,91	5.000.000	3.945.400
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Energi Kalimantan Barat	-	-	-	-	20.750.000	-	-	-	-	13.360.000	-	-	-	-	64,39	4.150.000	2.672.000
Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi penyusunan perumusan kebijakan bidang perikanan di Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi penyusunan perumusan kebijakan bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Keci di Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Realisasi antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi penyusunan kebijakan bidang Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan perumusan kebijakan bidang Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi penyusunan perumusan kebijakan pengendalian dampak pencemaran lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan kebijakan bidang Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan kebijakan energi dan kelistrikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Bina Sarana Perekonomian Daerah	-	-	-	-	608.270.000	-	-	-	-	502.987.916	-	-	-	-	35,46	121.654.000	100.597.583
Penyusunan Perumusan Kebijakan Sektor Pekerjaan Umum dan Jasa Kontruksi Kalimantan Barat	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	43.506.800	-	-	-	-	87,01	10.000.000	8.701.360
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Pekerjaan Umum dan Jasa Kontruksi Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Realisasi antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan Perumusan Kebijakan Sektor Perhubungan Kalimantan Barat	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	36.324.000	-	-	-	-	72,65	10.000.000	7.264.800
Penyusunan Perumusan kebijakan Sektor Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat	-	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	35.140.300	-	-	-	-	87,85	8.000.000	7.028.060
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Sanimas, Pamsimas dan PPSP)	-	-	-	-	72.320.000	-	-	-	-	49.781.800	-	-	-	-	68,84	14.464.000	9.956.360
Focus Discussion Group Kajian Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID, Rakor TPID)	-	-	-	-	85.350.000	-	-	-	-	79.780.700	-	-	-	-	93,47	17.070.000	15.956.140
Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Barat	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	47.669.702	-	-	-	-	95,34	10.000.000	9.533.940

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Realisasi antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Koperasi, UMKM dan Pariwisata Kalimantan Barat	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	40.375.000	-	-	-	-	80,75	10.000.000	8.075.000
Penyusunan Kebijakan Makro di Bidang Perekonomian Daerah Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rapat Koordinasi Kinerja Makro Ekonomi Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Focus Discussion Group Kajian Kelembagaan Kawasan Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2017 dan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2018	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	41.649.205	-	-	-	-	83,30	10.000.000	8.329.841
Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Bidang Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	42.159.435	-	-	-	-	84,32	10.000.000	8.431.887
Evaluasi Pelaksanaan dan Peningkatan Capacity Building BUMD	-	-	-	-	85.600.000	-	-	-	-	76.760.974	-	-	-	-	89,67	17.120.000	15.352.195

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Realisasi antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Monitoring Penyertaan Modal BUMD	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	9.840.000	-	-	-	-	39,36	5.000.000	1.968.000
Koordinasi penyusunan perumusan kebijakan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,36	-	-
Koordinasi penyusunan perumusan kebijakan bidang Pekerjaan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan Koperasi, UKM, dan Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi penyusunan perusahaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Strategis 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Realisasi antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi pengendalian dan pengawasan Lembaga Keuangan dan Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi pengembangan BUMD di Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan rancangan Perda tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan data Tabel 2.6 di atas, pada Tahun 2013-2016 Biro Perekonomian masih bergabung dengan Biro Administrasi Pembangunan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Barat menjadi Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat. Sejak Tahun 2017 Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat pecah menjadi 2 Biro yaitu Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dan Biro administrasi Pembangunan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Barat. Dapat di lihat pada Tabel 2.6 di atas bahwa realisasi capaian di setiap tahun nya mengalami peningkatan 2-3% pertahun nya, terlihat bahwa capaian Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2014-2018 sangat baik.

Selanjutnya, berdasarkan data Tabel 2.7 dapat dilihat perkembangan pendanaan program di Biro Perekonomian. Rasio antara realisasi dan anggaran pada masing-masing urusan berkisar antara 2,3%. Hal ini menandakan penyerapan anggaran untuk mencapai output tergolong tinggi. Namun jika dilihat per program, rasio realisasi terhadap anggaran mengalami fluktuasi karna terjadi pemekaran Biro pada Tahun 2017 Biro Ekonomi dan Pembangunan menjadi Biro Perekonomian dan Biro Administrasi Barang dan Jasa. Rata-rata anggaran maupun realisasi tiap urusan turun sekitar 3% dikarenakan adanya pemotongan anggaran pada semua OPD. Pertumbuhan anggaran per Tahun tertinggi di Biro Perekonomian pada Urusan Koordinasi dan Monitoring ke Kab/Kota yang ada di Kalimantan Barat. Sedangkan pendanaan kegiatan sangat fluktuatif, tergantung dari banyaknya dan jenisnya keluaran. Penamaan kegiatan juga kadang berubah menyesuaikan dengan evaluasi Gubernur.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat.

Tantangan (*Threats*) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan pengembangan pelayanan , yaitu :

1. Meningkatnya kompleksitas dan kebutuhan pelayanan birokrasi yang didukung dengan pengembangan kapasitas dan kompetensi sumberdaya aparatur di bidang perekonomian;
2. Meningkatnya tuntutan penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Meningkatnya tuntutan pelayanan melalui pemanfaatan berbasis teknologi informasi dalam rangka *E-Government* Bidang Perekonomian;
4. Penyesuaian sistem kerja pada instansi pemerintah dalam rangka penyederhanaan birokrasi.

Peluang (*Opportunities*) yang dihadapi, yaitu :

1. Tersedianya strategi *learning organization* dan pemanfaatan program pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
2. Tersedianya kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka reformasi birokrasi;
3. Era pemanfaatan teknologi digital dan penerapan aplikasi satu data;
4. Adanya dukungan kebijakan dan program/kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Biro Perekonomian sebagaimana **Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, bahwa Biro Perekonomian mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, dengan fungsinya yaitu :

- a. Perumusan program kerja di bidang perekonomian;
- b. Perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain di bidang perekonomian yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Biro Perekonomian masih menghadapi beberapa masalah yang diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perumusan Kebijakan Perekonomian.	1. Belum optimalnya sinkronisasi dan implementasi kebijakan perekonomian.	1. Belum optimalnya sinkronisasi dan implementasi kebijakan perekonomian di bidang Kebijakan Perekonomian (Pengendalian Inflasi, Percepatan Berusaha, PDRB, Infrastruktur,

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			Pariwisata Ekonomi Kreatif, Akses Keuangan). 2. Belum optimalnya sinkronisasi dan implementasi kebijakan perekonomian di bidang Sumber Daya Alam (Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta Ketahanan Pangan, Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air). 3. Belum optimalnya sinkronisasi dan implementasi kebijakan di bidang BUMD dan BLUD (BUMD Keuangan dan Aneka Usaha, Air Minum, Limbah dan Sanitasi, dan BLUD).
		2. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian.	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, BUMD dan BLUD.

3.2. Telaahan Visi, Misi Serta Progam Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 adalah :

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata kelola Pemerintahan”

Misi untuk mewujudkan **Visi Pembangunan** tersebut adalah :

1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
2. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-prinsip *Good Governance***;
3. Mewujudkan Kualitas Hidup masyarakat;
4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera;
5. Mewujudkan Masyarakat Yang Tertib;
6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

Terkait Visi dan Misi RPJMD 2018-2023, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagai Unsur Staf Perangkat Daerah Sekretariat Daerah yang merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan dan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan Provinsi di bidang Kebijakan Perekonomian, Sumber Daya Alam serta Badan Umum Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

Berkenaan dengan itu, maka Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat terkait erat dengan pencapaian Misi ke-2 yaitu "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Berkualitas Dengan Prinsip-Prinsip *Good Governance***".

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Biro Perekonomian tidak terdapat adanya telaahan Renstra K/L dan Renstra, dikarenakan bukan organisasi perangkat daerah teknis.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Biro Perekonomian tidak terdapat adanya telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dikarenakan bukan organisasi perangkat daerah teknis.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Terdapat beberapa kebijakan atas isu-isu strategis yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian, yaitu :

1. Kebijakan pengendalian inflasi;
2. Kebijakan Analisa Makro Perekonomian;
3. Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah;
4. Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum yang dimiliki oleh BUMD Air Minum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat;
5. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
6. Menorong Penyelenggaraan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Berdasarkan kebijakan atas isu-isu strategis diatas dapat dirumuskan 1 (satu) sasaran isu strategis Biro Perekonomian, yaitu "**Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian**".

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam lima tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian	Indeks Efektifitas Kebijakan Perekonomian	n/a	n/a	80%	85%	90%
		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP PD • Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 	n/a	n/a	100%	100%	100%

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Selanjutnya, strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi yang diemban Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi :	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan		
Misi :	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Berkualitas Dengan Prinsip-Prinsip <i>Good Governace</i>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Terwujudnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro; 2. Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pendorong Perekonomian Kalimantan Barat (Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Energi dan Air); 3. Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengelolaan dan Pendirian BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi serta BLUD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinkronisasi dan Koordinasi Percepatan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro; 2. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup; 4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Energi dan Air; 5. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan dan Pendirian BUMD, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha; 6. Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi; 7. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan dan Pendirian BLUD;

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat maka Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program Serta Kerangka Pendanaan tertuang dalam tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Biro Perekonomian
Setda Provinsi Kalimantan Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		1.20.1.20.03.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya Budaya Kerja yang Optimal dan Tatalaksana Kantor yang Efisien serta Efektif		100%	475.616.800													
		1.20.1.20.03.05.01.03	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terlaksananya Jaminan Asuransi untuk kendaraan dinas/perasional serta gedung		2 Unit	9.000.000													
		1.20.1.20.03.05.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Surat Izin kendaraan dinas operasional		2 Unit Mobil, 2 Unit Motor	3.000.000													
		1.20.1.20.03.05.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Tersediaya dokumen administrasi keuangan		1 Tahun	4.800.000													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		1.20.1.20.03.05.01.08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan		2 Jenis Cetakan, 19175 Penggandaan, 70 Jilid Buku Laporan	15.000.000													
		1.20.1.20.03.05.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman tamu		300 Kotak	15.000.000													
		1.20.1.20.03.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Tersedianya dukungan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah		1 Tahun	398.816.800													
		1.20.1.20.03.05.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Terpeliharaan dan tertatanya arsip di lingkungan Biro Perencanaan Setda Prov. Kalbar		1 Tahun	30.000.000													
		1.20.1.20.03.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	% Tersedianya Sarana dan Prasarana yang berkualitas		100%	56.903.200													
		.20.1.20.03.05.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan jabatan, kendaraan Dinas/Operasional		2 Unit	40.560.000													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		.20.1.20.03.05.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC/Kipas Angin kantor		12 Unit	6.778.000												
		.20.1.20.03.05.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Kantor		22 Komputer, 18 Printer	4.575.000												
		.20.1.20.03.05.02.64	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	Terpeliharanya Mebelair		35 Meja, 40 Kursi	4.990.200												
		1.20.1.20.03.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% tersedianya aparatur yang berbasis kompetensi dan berkualitas		100%	20.000.000												
		1.20.1.20.03.05.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Tersedianya dokumen penetapan kinerja		1 Dok	20.000.000												
		1.20.1.20.03.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% tersedianya informasi dan data Kinerja Biro Perekonomian yang berkualitas		100%	180.000.000												
		1.20.1.20.03.05.06.01	Penyusunan laporan keuangan	Tersusunnya Laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan		5 lap	35.000.000												

Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				tahunan															
		1.20.1.20.03.05.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya dokumen LAKIP		1 Dok	25.000.000												
		1.20.1.20.03.05.06.03	Penyusunan RENSTRA	Tersusunnya dokumen RENSTRA OPD		1 Dok	30.000.000												
		1.20.1.20.03.05.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya dokumen RENJA		2 Dok	30.000.000												
		1.20.1.20.03.05.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya dokumen LPPD dan LKPJ		2 Dok	30.000.000												
		1.20.1.20.03.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya DPA dan RKA SKPD		2 Dok	30.000.000												
		1.20.1.20.03.05.07	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	% Tersedianya Informasi dan data Aset Daerah yang berkualitas		100%	15.000.000												
		1.20.1.20.03.05.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Terlaksananya Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Aset		1 Lap	15.000.000												
Terwujudnya Kebijakan Pemerataan Ekonomi				Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	5,28%	5,28%		5,39%		5,40%		5,51%		5,62%		5,62%			

Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
di Kalimantan Barat				Terkendalinya Inflasi Daerah	3,60%	3,60%		3,52%		3,47%		3,41%		3,36%		3,36%			
	Terwujudnya Peningkatan Dibandang Sumberdaya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Energi dan Sumberdaya Mineral	3.00.3.00.00.06.15	Program Bina Perekonomian Daerah Dibandang Sumberdaya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Energi dan Sumberdaya Mineral	Tersedianya Kebijakan Perekonomian Daerah di Bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Energi dan Sumberdaya Mineral, Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah di Bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan.		75%	1.061.855.000												
		3.00.3.00.00.06.15.01	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Perkebunan	Terlaksananya Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Usaha Perkebunan		7 Kab	172.770.000												
		3.00.3.00.00.06.15.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	Jumlah Dokumen Laporan		6 Kab	74.120.000												

Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3.00.3.00.00.06.15.03	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terlaksananya Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan kesehatan Hewan		7 Kab/Kota	60.000.000													
		3.00.3.00.00.06.15.05	Koordinasi Perumusan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen Laporan		9 Kab/Kota	105.650.000													
		3.00.3.00.00.06.15.07	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perikanan di Kalimantan Barat	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perikanan di Kalimantan Barat		6 Kab/Kota	60.185.000													
		3.00.3.00.00.06.15.08	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pualu Kecil di Kalimantan Barat	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kalimantan Barat		6 Kab/Kota	40.350.000													
		3.00.3.00.00.06.15.09	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup		11 Kab/Kota	100.000.000													

Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3.00.3.00.00.06.15.10	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kehutanan	Terlaksananya Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kehutanan		8 kab	105.000.000													
		3.00.3.00.00.06.15.11	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan perumusan Kebijakan Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan		4 Kab	80.000.000													
		3.00.3.00.00.06.15.12	Penyusunan Kebijakan Bidnag Sumber Daya Mineral	Terlaksananya Penyusunana Kebijakan Bidang Sumber Daya Mineral		12 Kab/Kota	125.590.000													
		3.00.3.00.00.06.15.13	Penyusunan Kebijakan Energi dan Kelistrikan	Terlaksananya penyusunan Kebijakan Energi dan Kelistrikan		12 Kab/Kota	138.190.000													
	Terwujudnya Peningkatan Sarana Perekonomian Daerah	3.00.3.00.00.06.16	Program Bina Sarana Perekonomian Daerah	Tersedianya Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah Kalimantan Barat		60%	781.488.000													
		3.00.3.00.00.06.16.01	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		6 Kab/Kota	58.020.000													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Informatika																
		3.00.3.00.00.06.16.02	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum		5 kab	49.000.000												
		3.00.3.00.00.06.16.03	Koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat		6 Kab/Kota	58.000.000												
		3.00.3.00.00.06.16.04	Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Tim Percepatan Akses keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat		5 Kab/Kota	90.000.000												
		3.00.3.00.00.06.16.05	Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Koperasi, UKM dan Pariwisata	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Koperasi, UKM dan Pariwisata		3 Kab	63.757.000												
		3.00.3.00.00.06.16.06	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian dan		5 Kab/Kota	93.034.000												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			n	Perdagangan															
		3.00.3.00.00.06.16.07	Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah		8 Kab/Kota	130.857.000												
		3.00.3.00.00.06.16.08	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Lembaga Keuangan dan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan lembaga Keuangan dan Penanaman Modal		5 Kab/Kota	69.120.000												
		3.00.3.00.00.06.16.09	Koordinasi Pengembangan BUMD di Kalimantan Barat	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian BUMD di Kalimantan Barat		7 Kab/Kota	79.800.000												
		3.00.3.00.00.06.16.10	Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha		1 Raperda	89.900.000												
		5.01.5.01.01.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD				100%	621.052.400										

Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		5.01.5.01.01.08.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas				2 Kendar aan Roda 4, 2 Kendar aan Roda 2	5.000.000											
		5.01.5.01.01.08.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek				Materai	4.800.000											
		5.01.5.01.01.08.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan				2 Paket, 12625 Lembar, 70 Jilid Laporan	15.000.000											
		5.01.5.01.01.08.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman				600 Nasi Kotak dan 600 Snack	30.000.000											
		5.01.5.01.01.08.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah				55 Dok	488.880.000											
		5.01.5.01.01.08.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata				1000 Berkas	30.000.000											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.01.5.01.01.08.01.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan AC / Kipas Angin				15 Unit	10.000.000										
		5.01.5.01.01.08.01.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor				18 Unit Pc Komputer, 8 Unit Laptop, 10 Unit Printer	10.000.000										
		5.01.5.01.01.08.01.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi				1 Jenis	27.372.400										
		5.01.5.01.01.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor				100%	6.000.000										
		5.01.5.01.01.08.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Mebelair				19 Buah Meja, 20 Buah Kursi, 5 Buah Filling Kabinet	6.000.000										
		5.01.5.01.01.08.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100%	33.205.500										

Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Aparatur																
		5.01.5.01.01 .08.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	PNS yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop				10 Orang	15.000.000										
		5.01.5.01.01 .08.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penetapan Kinerja				1 Dok	18.205.500										
		5.01.5.01.01 .08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu				100%	188.420.800										
		5.01.5.01.01 .08.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan				5 Lap	34.988.400										
		5.01.5.01.01 .08.06.02	Penyusunan LAKIP	LAKIP				1 Dok	25.000.000										
		5.01.5.01.01 .08.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Renja SKPD				1 Dok	27.857.500										
		5.01.5.01.01 .08.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	LPPD dan LKPJ				2 Dok	28.005.800										

Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		5.01.5.01.01.08.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Monev				1 Dok	25.368.300											
		5.01.5.01.01.08.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	RKA dan DPA Biro PerencanaanProv. Kalbar				2 Dok	28.463.800											
		5.01.5.01.01.08.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi				1 Lap	18.737.000											
		5.01.5.01.01.08.07	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Waktu				100%	14.057.100											
		5.01.5.01.01.08.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah				5 Dok	14.057.100											
	Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi	4.1.1.13	Program Bina Penanaman Modal, Investasi, Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD	% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Investasi dan Penanaman Modal % Kinerja Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD				79%	273.722.300											
							79%													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				% Terlaksananya Kebijakan di Sektor BUMD				83%											
		01	Sinkronisasi penanaman modal dan lembaga keuangan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen laporan				1 Dok	76.974.300										
		02	Monitoring dan Evaluasi BUMD Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah dokumen				1 Dok	89.166.800										
		03	Penguatan BUMD se-Kalimantan Barat	Orang				50 Org	62.581.200										
		04	Penyusunan Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah dokumen				1 Dok	45.000.000										
		05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi	Jumlah dokumen															

Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha																	
		06	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Workshop Penguatan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Sekalimantan Barat)	Jumlah dokumen																
		07	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Penyusunan Peraturan Gubernur)	Jumlah dokumen																

Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat)																	
		08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi (Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Badan Usaha Milik Daerah)	Jumlah dokumen				1 Dok	74.616.400											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi (Rapat Koordinasi Badan Usaha Milik Daerah se-Kalimantan Barat)	Jumlah dokumen																
		10	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Badan Layanan Umum)	Jumlah dokumen				1 Dok	74.893.000											

Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Daerah)																	
		11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) se-Kalimantan Barat)	Jumlah dokumen																
	Terwujudnya Peningkatan PDRB Kalimantan Barat dari Sektor Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam, Kehutanan dan	4.1.125	Program Bina Peningkatan Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam, Mineral dan Energi, Kehutanan dan Lingkungan	% Terlaksananya Kebijakan Sektor Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti % Terlaksananya Kebijakan Sektor Mineral dan Energi yang Ditindaklanjuti				75%	1.346.041.000											
								75%												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Mineral serta Kebijakan Bidang Energi dan Kelistrikan, Bahan Bakar Minyak dan Gas Kemandirian Pangan dan Meningkatnya Lingkungan Hidup		Hidup serta Ketahanan Pangan	% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Kelistrikan dan Gas yang Ditindaklanjuti				75%												
				% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Kehutanan yang Ditindaklanjuti				75%												
				% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti				77%												
				% Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan Yang Ditindaklanjuti				77%												
		01	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hotrikultura di Kalimantan	Jumlah dokumen				1 dok	34.709.800											

Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Barat																
		02	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perkebunan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen				1 dok	64.383.900										
		03	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen				1 dok	58.984.000										
		04	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Perkebunan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen				1 dok	49.884.700										
		05	Fasilitasi Percepatan	Jumlah dokumen				1 dok	65.418.600										

Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat																	
		06	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen				1 dok	49.927.600											
		07	Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen				1 dok	66.165.900											
		08	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen				1 dok	48.492.300											
		09	Penyusunan	Jumlah dokumen				1 dok	64.935.900											

Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Bahan Kebijakan Bidang Kehutanan di Kalimantan Barat																	
		10	Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen				1 dok	59.709.200											
		11	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen				1 dok	84.153.200											
		12	Sinkronisasi Program Ketahanan Pangan di Kalimantan Barat Menuju Desa Swasembada Mandiri Pangan	Jumlah dokumen				1 dok	74.148.900											

Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		13	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pangan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen				1 dok	49.990.500											
		14	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen																
		15	Sinergisitas Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen				1 dok	70.633.400											
		16	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya	Jumlah dokumen				1 dok	71.422.000											

Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Mineral dan Air Tanah di Kalimantan Barat																	
		17	Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen				1 dok	81.539.800											
		18	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kelistrikan dan Evaluasi Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Gas di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen				1 dok	78.983.400											
		19	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen				1 dok	63.809.800											

Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen															
		21	Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan di Bidang Pertambangan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen				1 dok	70.336.400										
		22	Sinergisitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dalam rangka Peningkatan IKLH di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen				1 dok	79.327.700										
		23	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen				1 dok	59.084.000										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		24	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen																
	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program Sarana Perekonomian	4.1.16.2	Program Bina Sarana Perekonomian	% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Perdagangan Yang Ditindaklanjuti				66%	406.818.000											
				% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Perindustrian Yang Ditindaklanjuti				50%												
				% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Koperasi Yang Ditindaklanjuti				66%												
				% Terlaksananya Kebijakan di Sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif Yang Ditindaklanjuti				83%												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Pariwisata Yang Ditindaklanjuti				33%											
				% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Fisik Yang Ditindaklanjuti				45%											
				% Terlaksananya Kebijakan Perhubungan Yang Ditindaklanjuti				33%											
				% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Komunikasi Yang Ditindaklanjuti				33%											
		01	Sinkronisasi Percepatan Pembangunan di Bidang Infrastruktur (Perhubungan, Kominfo, dan Pekerjaan Umum)	Jumlah dokumen				1 dok	74.616.400										

Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		02	Sinkronisasi Percepatan Pembangunan di Bidang Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen				1 dok	79.514.000											
		03	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen				1 dok	98.770.900											
		04	Percepatan Pembangunan Perindustrian (Hilirisasi dan Kawasan Industri) dan Perdagangan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen				1 dok	79.999.100											
		05	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Perekonomian Mikro	Jumlah dokumen																

Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		06	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Perekonomian Mikro (Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kerjasama bidang perekonomian regional dan sub regional)	Jumlah dokumen																
		07	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Perekonomian Mikro (Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perekonomian kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan perbatasan dan kawasan strategis Nasional)	Jumlah dokumen																

Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		08	Penyusunan Analisa Makro Perekonomian Kalimantan Barat	Jumlah dokumen				1 dok	73.917.600													
		09	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Makro	Jumlah dokumen																		
	Terwujudnya Pengendalian Inflasi Daerah, Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	4.1.15.3	Program Pengendalian Inflasi Daerah, Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Inflasi Daerah				83%	365.697.500													
% Terlaksananya Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah							45%															
% Dokumen Pertimbangan Kebijakan Penyelesaian Persoalan Pelaksanaan Berusaha							53%															
		01	Pengendalian Inflasi daerah di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen				1 dok	99.880.400													

Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02	Percepatan Pembangunan Pasar Rakyat Lintas Kabupaten di Kalimantan Barat dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah dokumen				1 dok	49.560.200										
		03	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen				1 dok	69.297.400										
		04	Fasilitasi Percepatan Akses Keuangan Daerah dalam rangka Peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi untuk mendukung Desa Mandiri di Kalimantan	Jumlah dokumen				1 dok	98.185.500										

Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Barat																	
		05	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen				1 dok	48.774.000											
		06	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Makro (Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah)	Jumlah dokumen																
		07	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Makro (Koordinasi dan sinkronisasi percepatan akses keuangan daerah dan percepatan pelaksanaan berusaha)	Jumlah dokumen																

Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Terwujudnya tatakelola pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																	
		4.01	Sekretariat Daerah							80%	3.077.603.222	85%	3.520.000.129	90%	3.873.508.002					
		04.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	637.124.582	100%	668.654.624	100%	737.027.946	100%			Biro Perekonomian	
		4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Keuangan tepat waktu % Laporan Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	115.493.902	100%	118.000.000	100%	144.100.000	100%			Biro Perekonomian	

Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dok	26.607.522	1 Dok	27.000.000	1 Dok	29.700.000	1 Dok		Biro Perekonomian	
		4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dok	12.516.268	1 Dok	13.000.000	1 Dok	14.300.000	1 Dok		Biro Perekonomian	
		4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dok	14.300.000	1 Dok		Biro Perekonomian	
		4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Lap	19.126.459	1 Lap	20.000.000	1 Lap	22.000.000	1 Lap		Biro Perekonomian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				SKPD															
		4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Lap	57.243.653	3 Lap	58.000.000	2 Lap	63.800.000	2 Lap		Biro Perekonomian	
		4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Lap	93.219.309	1 Lap	94.000.000	1 Lap	38.148.800	1 Lap		Biro Perekonomian	
		4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Lap	93.219.309	1 Lap	94.000.000	1 Lap	38.148.800	1 Lap		Biro Perekonomian	
		4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Lap	8.363.878	1 Lap	9.000.000	1 Lap	9.900.000	1 Lap		Biro Perekonomian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Lap	8.363.878	1 Lap	9.000.000	1 Lap	9.900.000	1 Lap		Biro Perekonomian	
		4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Barang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	281.406.650	100%	307.654.624	100%	371.846.186	100%		Biro Perekonomian	
		4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	150 Kotak	11.250.000	3 Paket	21.796.086	3 Paket		Biro Perekonomian	
n/a	n/a				n/a	n/a	n/a	n/a	1 Jenis	8.250.000									
n/a	n/a				n/a	n/a	n/a	n/a	4 kotak	314.624									
		4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60 Buku	13.199.650	60 Buku	14.000.000	2 Paket	15.400.000	2 Paket		Biro Perekonomian	
n/a	n/a				n/a	n/a	n/a	n/a	4638 Lembar	4638 Lembar									
		4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30 Orang	235.807.000	33 Orang	240.000.000	33 Lap	301.224.000	33 Lap		Biro Perekonomian	
n/a	n/a				n/a	n/a	n/a	n/a	45 Orang	32.400.000	47 Orang	33.840.000							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dok	33.426.100	1 Dok		Biro Perekonomian	
		4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Lap	41.947.843	1 Lap	42.000.000	1 Lap	65.232.960	1 Lap		Biro Perekonomian	
		4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Lap	41.947.843	1 Lap	42.000.000	1 Lap	65.232.960	1 Lap		Biro Perekonomian	
		4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	96.693.000	100%	98.000.000	100%	107.800.000	100%		Biro Perekonomian	

Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Unit	51.750.000	2 Unit	52.000.000	2 Unit	57.200.000	2 Unit		Biro Perekonomian	
		4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25 Unit	15.000.000	25 Unit	16.000.000	25 Unit	17.600.000	25 Unit		Biro Perekonomian	
		4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Unit	29.943.000	5 Unit	30.000.000	5 Unit	33.000.000	5 Unit		Biro Perekonomian	
Terwujudnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian	4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Hasil Kajian dibidang perekonomian yang dimanfaatkan / ditindaklanjuti Persentase hasil kajian di bidang sumberdaya alam yang dimanfaatkan / Ditindaklanjuti	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80%	2.440.478.640	85%	2.851.345.505	90%	3.136.480.056	90%		Biro Perekonomian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Persentase kinerja BUMD/BLUD yang sehat															
		4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Bahan Rumusan Kebijakan Perekonomian	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Dok	1.056.499.080	8 Dok	1.162.148.000	7 Dok	1.278.362.800	22 Dok		Biro Perekonomian	
		4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Dok	526.877.560	4 Dok	579.565.000	3 Dok	637.521.500	3 Dok		Biro Perekonomian	
		4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Dok	529.621.520	4 Dok	582.583.000	4 Dok	640.841.300	4 Dok		Biro Perekonomian	
		4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8 Dok	819.153.610	7 Dok	901.067.000	7 Dok	991.173.700	7 Dok		Biro Perekonomian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Dok	344.918.530	3 Dok	379.410.000	3 Dok	417.351.000	3 Dok		Biro Perekonomian	
		4.01.06.1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Dok	299.188.120	2 Dok	329.106.000	2 Dok	362.016.600	2 Dok		Biro Perekonomian	
		4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Dok	175.046.960	2 Dok	192.551.000	2 Dok	211.806.100	2 Dok		Biro Perekonomian	
		4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Bahan Rumusan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Dok	564.825.950	4 Dok	588.130.505	5 Dok	866.943.556	3 Dok		Biro Perekonomian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Dok	314.395.400	2 Dok	345.834.000	1 Dok	380.417.400	1 Dok		Biro Perekonomian	
		4.01.06.1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Dok	105.589.550	1 Dok	116.148.000	1 Dok	127.762.800	1 Dok		Biro Perekonomian	
		4.01.06.1.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dok	110.000.000	1 Dok		Biro Perekonomian	
		4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengelolaan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Dok	144.841.000	1 Dok	126.148.505	1 Dok	138.763.356	1 Dok		Biro Perekonomian	

Rencana Strategis 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kinerja Akhir Periode RPJMD Tahun 2023			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4.01.06.1.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dok	110.000.000	1 Dok		Biro Perekonomian	

Rencana Program dan Kegiatan tersebut mencakup Program dan Kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap perangkat daerah. Program Kegiatan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat yaitu **Pertama, Program Umum** yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana perkantoran dan sumber daya aparatur. **Kedua, Program Khusus** yang diarahkan untuk mengoperasionalkan target khusus untuk mendukung tercapainya target rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

A. Program Umum

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan, yaitu :
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 1.1.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1.2.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1.4.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 1.4.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 1.4.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 1.4.4 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
 - 1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1.5.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - 1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 1.6.2 Pemeliharaan Mebel
 - 1.6.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - 2.1 Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
Sub Kegiatan, yaitu:
 - 2.1.1 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro;
 - 2.1.2 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro.
 - 2.2 Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
Sub Kegiatan, yaitu:
 - 2.2.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
 - 2.2.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
 - 2.2.3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.
 - 2.3 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
Sub Kegiatan, yaitu:
 - 2.3.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
 - 2.3.2 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
 - 2.3.3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah;
 - 2.3.4 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
 - 2.3.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PEREKONOMIAN

Berikut ditampilkan Indikator Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.

Indikator Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat yang mengacu pada tujuan:

**Table 7.1.
Indikator Kinerja
Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun
			Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	n/a	n/a	n/a	3 Dok	4 Dok	3 Dok	10 Dok
2	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	n/a	n/a	n/a	4 Dok	4 Dok	4 Dok	12 Dok
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	n/a	n/a	n/a	4 Dok	3 Dok	3 Dok	10 Dok
4	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	n/a	n/a	n/a	2 Dok	2 Dok	2 Dok	6 Dok
5	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	n/a	n/a	n/a	2 Dok	2 Dok	2 Dok	6 Dok
6	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	n/a	n/a	n/a	4 Dok	2 Dok	1 Dok	6 Dok


No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun
			Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jasa Keuangan dan Aneka Usaha							
7	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi	n/a	n/a	n/a	2 Dok	1 Dok	1 Dok	4 Dok
8	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	n/a	n/a	n/a	n/a	0 Dok	1 Dok	1 Dok
9	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD	n/a	n/a	n/a	2 Dok	1 Dok	1 Dok	4 Dok
10	Jumlah Bahan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD yang dihasilkan	n/a	n/a	n/a	n/a	0 Dok	1 Dok	1 Dok

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Revisi) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 memuat Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan, Program dan Kegiatan yang merupakan acuan dan panduan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat, dan diharapkan Renstra ini dapat menjadi komitmen dan kesatuan langkah dalam menentukan arah dan peran Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dalam mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya, sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan visi dan misi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, April 2022
Kepala Biro Perekonomian,



FRANS ZENO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19790302 199802 1 001